

Landasan Standar Akuntansi Mengenai Perbandingan Prinsip Kerangka Konseptual Global Dan Realitas Indonesia

Aryanto Nur¹, Ananda Salsabila Aulia², Devi Dwi Aryanti³, Dini Meliana Putri⁴, Helen Valentina⁵, Nasywa Ardiningtias Putri⁶, Salsabila Putri⁷

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

email korespondensi : aryantonur@gmail.com, anandasalsabilaaulia@gmail.com, devidwiaryanti9@gmail.com, dinimelianaputri@gmail.com, hellenhel2006@gmail.com, nasywaardtp@gmail.com, salsabilput1802@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 11/05/2025

Revised 11/05/2025

Accepted 13/05/2025

Abstract

Standards of accounting are a framework that serves as the procedure for the preparation of financial statements in the presentation of financial reports. The conceptual framework of accounting is an important foundation in the development of accounting standards, both at the global level through the International Financial Reporting Standards (IFRS) formulated by the International Accounting Standards Board (IASB), and at the national level through the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia. However, in practice, questions often arise regarding the extent to which the principles of the global conceptual framework can be fully applied in Indonesia, which has different institutional, cultural, social, and legal characteristics. This study aims to examine the compatibility between the global conceptual framework and the reality of its implementation in Indonesia, as well as to identify the existing gaps and potential future adjustments. The approach used is qualitative with a literature study method and content analysis of official documents, accounting standards, and various relevant academic studies. This method allows the researcher to explore meanings and understand the context of the implementation of accounting standards in a deeper and more comprehensive way. The findings of the study indicate that there are several gaps, especially in the application of the universal values of IFRS in the local environment, which has a different approach to transparency, accountability, and oversight systems. This study is expected to provide constructive input for the development of a more adaptive national conceptual framework while still aligned with global directions.

Keywords: Conceptual Framework, IFRS, Accounting Standards, Global principles

Abstrak

Standar Akuntansi merupakan suatu kerangka yang menjadi prosedur pembuatan laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi merupakan fondasi penting dalam penyusunan standar akuntansi, baik pada tingkat global melalui International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dirumuskan oleh International Accounting Standards Board (IASB), maupun di tingkat nasional seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia. Meski demikian, dalam praktiknya sering muncul pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip kerangka konseptual global tersebut dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, yang memiliki karakteristik institusional, budaya, sosial, dan sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kerangka konseptual global dan realitas penerapannya di Indonesia, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan potensi penyesuaian ke depan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis isi terhadap dokumen-dokumen resmi, standar akuntansi, serta berbagai kajian akademik yang relevan. Metode ini memungkinkan untuk peneliti mengeksplorasi makna serta memahami konteks penerapan standar akuntansi secara

lebih mendalam dan komprehensif. Hasil kajian yaitu menunjukkan adanya sejumlah kesenjangan, terutama pada aspek penerapan nilai-nilai universal IFRS dalam lingkungan lokal yang memiliki pendekatan berbeda terhadap transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pengembangan kerangka konseptual nasional yang lebih adaptif namun tetap sejalan dengan arah global.

Kata kunci: Kerangka Konseptual, IFRS, Standar Akuntansi, Prinsip Global



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah proses pencatatan, pelaporan, dan sebuah ikhtisar suatu transaksi keuangan terhadap entitas, baik itu organisasi, individu maupun perusahaan. Sedangkan dengan kata lain akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam bentuk pencatatan, pengklasifikasian, dan penyimpanan untuk disajikan dalam suatu laporan keuangan yang memuat informasi yang berguna dalam proses pengambilan (Soepardi, Eddy Mulyadi, 2024). Pada proses yang terjadi dalam siklus akuntansi memiliki sebuah standar yang mencakup berbagai aturan yang harus dipenuhi.

Standar Akuntansi merupakan suatu kerangka yang menjadi prosedur pembuatan laporan keuangan agar terdapat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan, hal tersebut bertujuan agar mempermudah pembaca untuk memahami dan membandingkan suatu entitas yang berbeda-beda dari laporan keuangan. Standar akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang tepat dan relevan sehingga dapat dibandingkan secara internasional. Adanya pedoman *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) setelah tahun 2001 menggantikan *International Accounting Standards* (IAS) membuat perusahaan menyajikan laporan keuangan yang transparan, tepat, dan konsisten untuk dibandingkan diseluruh pasar global. Kerangka konseptual menetapkan konsep dasar pelaporan keuangan yang dapat memandu dalam pengembangan IFRS. Kerangka ini membantu memastikan konsistensi transaksi secara konseptual sehingga transaksi serupa mendapatkan cara yang sama. Di Amerika Serikat, *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) menjadi sebuah pusat standar akuntansi. Keduanya memiliki peran yang penting dalam kontribusi laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan dapat dipercaya dan relevan untuk dibandingkan di tingkat global.

IFRS dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh pasar keuangan yang ada di dunia. Di Indonesia, penerapan IFRS dilakukan secara bertahap melalui pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). SAK yang berlaku di Indonesia kini sebagian besar telah mengacu pada IFRS dengan pendekatan adopsi penuh, meskipun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal.

Pada tahun 2019, DSAK IAI secara resmi menyetujui revisi Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang disusun berdasarkan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang menerbitkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan pada tahun 2018. Revisi tersebut ditetapkan efektif di Indonesia mulai tahun 2020 dan menjadi landasan

dalam pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kerangka konseptual baru yang menekankan perbaikan kualitas keuangan, seperti relevansi, kinerja, keterbandingan, dan keterpahaman, serta memperkenalkan unsur-unsur laporan keuangan yang lebih terdefinisi secara konseptual, seperti revisi definisi aset dan liabilitas.

Dengan penerapan kerangka konseptual baru ini, praktik pelaporan keuangan Indonesia diharapkan menjadi lebih sejalan dengan praktik global dan mampu memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, baik investor, kreditur, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Proses adopsi ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengukur peningkatan kualitas tata kelola perusahaan melalui transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pengembangan kerangka konseptual menjadi pedoman dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan teoritis yang telah mendasari penetapan standar akuntansi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghadapi permasalahan akuntansi. Dengan adanya kerangka konseptual maka diharapkan laporan keuangan memiliki hasil yang berkualitas, relevan, dan juga dapat dibandingkan serta dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Adanya standar akuntansi tentunya untuk menciptakan kerangka kerja yang koheren dan konsisten dalam menyusun laporan keuangan, hal tersebut juga dapat dijadikan pedoman bagi penyusun laporan keuangan dalam menghadapi situasi yang belum diatur oleh standar akuntansi yang telah ada. Di Indonesia, DSAK IAI merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengadopsi dan memelihara standar akuntansi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi dengan tetap memperhatikan konsistensi standar internasional. DSAK IAI melalui tanggung jawabnya memiliki peran strategis dalam menyesuaikan standar akuntansi agar tetap relevan digunakan di Indonesia. Standar tersebut nantinya digunakan sebagai latar belakang dari dinamika perekonomian nasional dan juga perkembangan praktik bisnis, serta kebutuhan para pemangku kepentingan. DSAK juga berperan dalam mengadopsi standar internasional khususnya IFRS sehingga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dapat meningkat guna mendorong daya saing antar entitas di Indonesia sehingga dapat dibandingkan dalam kancah global.

Dalam konteks standar global, akuntansi memainkan peran yang sangat penting karena akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat menyebabkan informasi keuangan terkomunikasikan secara universal. Kompleksitas tersebut didukung dengan adanya perbedaan budaya, sistem hukum, regulasi pemerintah, tahap perkembangan pasar keuangan, bahkan jenis mata uang yang berbeda di setiap negara. Di era bisnis internasional, laporan keuangan perlu disajikan secara transparan, relevan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan transnasional agar dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi yang akurat.

Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai tantangan tersendiri dalam mengadaptasi dan menerapkan standar akuntansi internasional, khususnya IFRS. Perekonomian suatu negara, tradisi hukum yang berbasis hukum perdata, dan berbagai struktur sosial dan budaya cenderung menjadi penghalang dalam mewujudkan keselarasan antara prinsip-prinsip global dan praktik-praktik lokal. Variasi tersebut mempengaruhi keragaman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan di Indonesia. Misalnya, nilai wajar yang menjadi prinsip utama dalam IFRS dapat mengatasi batasan penerapan di Indonesia karena kurangnya pasar aktif atau batasan penilaian data yang

andal.

Dalam praktik bisnis internasional, entitas sering kali menghadapi kompleksitas tambahan dalam hal konversi mata uang asing, konsolidasi lintas pengakuan, dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi negara yang menjadi tempat beroperasi. Oleh karena itu, peran profesional akuntansi menjadi sangat vital. Akuntan publik, auditor, dan konsultan dari lembaga seperti bank dan kantor akuntan internasional memiliki kemampuan teknis dan pemahaman lintas batas yang diperlukan untuk menelaah, menginterpretasikan, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku secara global. Perannya dalam menjembatani kesenjangan antara kepentingan lokal dan tuntutan internasional sangat dibutuhkan, sekaligus memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan dari berbagai negara.

Dengan demikian, penerapan standar global tidak hanya ditentukan oleh komitmen institusi pembuat standar, tetapi juga bergantung pada kesiapan infrastruktur ekonomi, profesional pendidikan, serta kesadaran entitas dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya agar dapat bersaing di tingkat global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan prinsip dalam kerangka konseptual global dengan praktik nyata yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menyoroti kesenjangan yang terjadi antara kerangka konseptual global dan realitas Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyelarasan standar akuntansi di Indonesia dengan prinsip global tanpa mengabaikan kearifan dan kebutuhan lokal.

Kerangka dasar penyampaian dan penyusunan atau yang biasa disebut sebagai Kerangka konseptual adalah konseptual yang berlandaskan perencanaan dan pengajuan pelaporan keuangan untuk memangku kepentingan eksternal. *International Accounting Standards Board* (IASB), mengembangkan dan kerangka konseptual diikuti oleh negara lain, yang paling terkenal adalah Indonesia. Kerangka konseptual kerapnya digunakan untuk arah persiapan standar masa depan dan untuk memecahkan masalah akuntansi yang belum diatur dengan standar yang ada. Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual yaitu kerangka yang saling terhubung antara konsep yang diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus menunjukkan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Penggunaan standar oleh manajemen harus menerapkan pemikiran profesional dalam memutuskan kebijakan akuntansi sehingga menciptakan informasi yang berhubungan. Dalam mengimplementasikan penerapan profesional, manajemen harus memperhitungkan definisi, standar pengakuan dan gagasan penaksiran untuk kerangka konseptual.

Menurut ATLAS.ti dalam artikelnya dinyatakan bahwa inti dari kerangka konseptual adalah kerangka tempat kita menyampaikan pertanyaan dan menganalisis penelitian. Kerangka konseptual menjelaskan konsep yang diidentifikasi dan mengartikan kaitannya di antara konsep tersebut. Tujuan dari kerangka konseptual yaitu memberikan bantuan untuk mempermudah masalah dan tujuan penelitiannya, membantu melengkapi pertanyaan, juga membantu proses penyatuan dan analisis data.

Harmonisasi merupakan suatu metode untuk memaksimalkan praktik akuntansi dengan cara mendedukasi batas seberapa jauh praktik dapat bervariasi. Standar harmonisasi bebas dari masalah dan dapat memaksimalkan *comparability* data keuangan yang bersumber diberbagai negara. Perusahaan yang ikut serta dalam akuntansi internasional yaitu

ketika perusahaan mendapat kemungkinan untuk menjalankan semacam transaksi ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang ke negara lain, dikerjakan ketika perusahaan dalam negeri ingin menjalankan penelitian mengenai kepantasan perusahaan kepada pembeli luar. Seandainya konsumen diharap menyampaikan informasi keuangan berhubungan melalui perusahaan, kemungkinan besar fakta keuangan tersebut sangat sulit untuk diterima. Terdapat persepsi aturan akuntansi yang tidak adil dalam perusahaan. Beberapa perusahaan baru dalam bisnis internasional dapat meminta pertolongan dari akuntan bank dan kantor yang memiliki kemampuan menelaah serta mendefinisikan informasi keuangan tersebut.

Di Indonesia *Implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS)*, memberikan dampak positif serta negatif pada laporan keuangan di Indonesia. Penerapan IFRS telah menaikkan kualitas informasi akuntansi yang langsung dibuktikan dengan berkurangnya manajemen laba dan membaiknya hubungan nilai laba (Murtini, 2016). Implementasi IFRS telah dilaksanakan pada tahun 2012. Menurut Warren, dkk (2014:57) IFRS adalah standar akuntansi internasional, dibangun oleh *International Accounting Standards Boards (IASB)* guna menyusun neraca keuangan suatu perusahaan. IFRS banyak mengakibatkan perselisihan karena disparitas dari praktik akuntansi.

(Patty et al, 2021) menyatakan kemajuan teori akuntansi berlangsung saat kurun ke-20. Teori akuntansi sering digunakan sebagai dasar dalam praktik akuntansi, yang dimana tujuannya untuk memberi tahu dan memperkirakan penerapan akuntansi (M. A. Harahap & Siregar, 2022). (Zyznarska-Dworczak, 2017) mengemukakan tujuan teori akuntansi selain guna merumuskan gagasan dan metodenya, teori akuntansi juga bisa untuk membantu menerangkan sebuah solusi dalam praktik.

Kerangka Berpikir



Pengertian IFRS dan Penggunaan IFRS secara Global menurut Warren, *International Financial Reporting Standard (IFRS)* merupakan seperangkat standar akuntansi global yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. IASB merupakan badan independen yang membuat peraturan akuntansi. IASB tidak membuat peraturan akuntansi untuk suatu negara tertentu melainkan dengan membuat peraturan akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai negara dengan tujuan mengembangkan seperangkat standar akuntansi global. IFRS digunakan bagi perusahaan yang menerbitkan utang dagang dan surat berharga untuk ekuitas kepada public yang disebut perusahaan publik.

Tujuan utama IFRS adalah meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan, khususnya di era globalisasi ekonomi yang semakin pesat.

IFRS dirancang untuk menyediakan kerangka kerja pelaporan keuangan yang seragam di seluruh dunia. Menurut Nobes, C., Parker (2020), adopsi IFRS memungkinkan peningkatan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan lintas negara. Namun, implementasinya di beberapa negara menghadapi kendala, seperti perbedaan budaya, hukum, dan tingkat perkembangan ekonomi. IFRS bertujuan untuk menyediakan standar yang dapat diterapkan oleh entitas di berbagai negara, sehingga investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah memahami dan membandingkan laporan keuangan. Nobes, C., Parker, (2020) menyatakan bahwa penerapan IFRS memungkinkan perusahaan global untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor.

Ada empat organisasi dunia yang menyusun standar akuntansi keuangan, yaitu diantaranya adalah *International Accounting Standards Board (IASB)*, *Organization of Securities Commissions (IOSCO)*, *European Commissions (EC)*, dan *International Federation of Accountants (IFAC)*. *International Accounting Standards Board (IASB)*, adalah lembaga terindependen dalam penyusunan standar akuntansi. Tujuan dari organisasi tersebut adalah mengembangkan serta memotivasi agar diterapkannya standar akuntansi global dengan kualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Kerangka konseptual mendeskripsikan tujuan dari dan konsep untuk, pelaporan keuangan bertujuan umum. Tujuan Kerangka Konseptual sebagai berikut.

1. Membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berdasarkan konsep yang konsisten;
2. Membantu penyusun laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada Standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika Standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi
3. Membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar. Kerangka konseptual bukan merupakan standar. Kerangka konseptual ini tidak ada yang mengungguli Standar atau persyaratan dalam Standar tertentu.

Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum, DSAK IAI terkadang dapat menentukan persyaratan yang berbeda dari aspek kerangka konseptual. Jika DSAK IAI melakukannya, DSAK IAI akan menjelaskan perbedaan dalam dasar kesimpulan tentang standar tersebut.

Kerangka konseptual akan direvisi dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman DSAK IAI dalam penggunaan kerangka konseptual tersebut. Revisi kerangka konseptual tidak akan secara otomatis mengarah pada perubahan atas standar. Setiap keputusan untuk mengubah standar akan mengharuskan DSAK IAI untuk melalui due process dengan menambahkan proyek ke dalam agendanya dan mengembangkan amendemen terhadap Standar tersebut.

Kerangka konseptual menyediakan landasan bagi standar akuntansi, sebagai berikut.

1. Berkontribusi terhadap transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan, yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomik berdasarkan informasi.
2. Memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang-orang yang telah mempercayakan uangnya ke pihak tersebut. Standar berdasarkan kerangka konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta

pertanggungjawaban manajemen. Sebagai sumber informasi yang dapat diperbandingkan secara global, Standar tersebut juga sangat penting bagi para regulator di seluruh dunia.

3. Berkontribusi pada efisiensi ekonomik dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis, penggunaan bahasa akuntansi tunggal yang tepercaya yang berasal dari standar berdasarkan kerangka konseptual menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional

Tantangan lainnya muncul dari perubahan atau ketidakpastian dalam regulasi dan standar akuntansi. Tantangan ini berasal dari dinamika yang terkait dengan perubahan atau ketidakpastian dalam regulasi dan standar akuntansi. Proses penerapan aturan-aturan inisieringkali tidak selalu jelas karena adanya perubahan yang dapat terjadi, serta ketidakpastian dalam interpretasinya (Abubakar et al., 2022). Situasi ini menuntut auditor untuk tetap up-to-date dengan perkembangan terkini dalam peraturan dan standar akuntansi. Mereka perlu memiliki kesadaran mendalam terhadap kerangka kerja regulasi yang berlaku dan kemampuan untuk dengan cepat beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, kunci keberhasilan adalah kemampuan auditor untuk selalu memperbaharui pengetahuan mereka dan mengintegrasikan perubahan tersebut ke dalam praktik audit mereka, sehingga dapat memberikan pendapat yang akurat dan relevan (Solechan, 2021). Kejadian tinggi korupsi di Nigeria menjadi perhatian serius dalam konteks audit karena berpotensi mengakibatkan risiko kehilangan aset atau manipulasi keuangan. Tingkat korupsi yang tinggi menciptakan lingkungan di mana entitas dapat terkena dampak negatif, dan oleh karena itu, auditor perlu meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan mereka (Owolabi, 2017). Identifikasi dan penanganan potensi risiko korupsi menjadi fokus utama, dengan kebutuhan untuk menerapkan pengawasan dan pengendalian internal yang lebih ketat sebagai suatu keharusan. Peningkatan dalam sistem pengendalian internal membantu memitigasi. Salah satu tantangan yang signifikan adalah infrastruktur keuangan yang masih dalam tahap perkembangan. Kondisi ini dapat menghambat proses pengumpulan data keuangan yang akurat, memaksa auditor untuk melakukan upaya ekstra dalam memverifikasi informasi yang diberikan oleh entitas yang diaudit. Oleh karena itu, pengembangan dan perbaikan infrastruktur keuangan menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan data yang handal dan mendukung pengauditan yang efektif (Yahaya, 2021).

Selain itu, kompleksitas sistem pajak dan aturan kepatuhan fiskal yang ketat menjadi tantangan tambahan. Auditor dihadapkan pada tuntutan untuk memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa entitas yang diaudit mematuhi aturan-aturan tersebut. Kebutuhan untuk memiliki sistem pelaporan yang sesuai dengan peraturan fiskal menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan entitas dan meminimalkan risiko konsekuensi pajak yang mungkin timbul (OECD, 2016). Dalam menghadapi kompleksitas ini, auditor harus bekerja secara cermat dan proaktif dalam memeriksa serta memastikan konsistensi antara kebijakan perusahaan dengan aturan pajak yang berlaku, sehingga dapat memberikan penilaian yang akurat terkait kepatuhan pajak entitas yang diaudit (Muanifah et al., 2022). Selain itu, kompleksitas sistem pajak dan aturan kepatuhan fiskal yang ketat menjadi tantangan tambahan. Auditor dihadapkan pada tuntutan untuk memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa entitas yang diaudit



mematuhi aturan-aturan tersebut. Keharusan untuk memiliki sistem pelaporan yang sesuai dengan peraturan fiskal menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan entitas dan meminimalkan risiko konsekuensi pajak yang mungkin timbul (OECD, 2016). Dalam menghadapi kompleksitas ini, auditor harus bekerja secara cermat dan proaktif dalam memeriksa serta memastikan konsistensi antara kebijakan perusahaan dengan aturan pajak yang berlaku, sehingga dapat memberikan penilaian yang akurat terkait kepatuhan pajak entitas yang diaudit (Muanifah et al., 2022).

Selain itu, pentingnya sikap terhadap pengendalian intern menjadi fokus utama dalam proses audit. Auditor harus memiliki pemahaman mendalam dan mampu mengevaluasi sejauh mana pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas efektif dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul. Evaluasi ini membantu auditor memastikan bahwa kontrol internal dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko potensial, sehingga meminimalkan peluang terjadinya kekeliruan atau kecurangan. Terakhir, tingkat kesadaran akan pentingnya audit di lingkungan bisnis Nigeria perlu ditingkatkan. Kesadaran yang lebih tinggi akan memberikan dorongan untuk memperkuat praktik audit yang baik dan memastikan bahwa peran auditor dianggap sebagai elemen kunci dalam menjaga kesehatan keuangan dan integritas bisnis. Edukasi dan komunikasi yang efektif mengenai manfaat audit dapat membantu mengubah persepsi dan meningkatkan apresiasi terhadap kontribusi auditor dalam menjaga transparansi dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis (PCAOB, 2022)

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan bersamaan dengan pembahasan penelitian perpustakaan (studi literatur). Didukung dengan penekanan pada pemahaman data kuantitatif. Metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara rinci. Dasar kerangka konseptual global dan realitas akuntansi di Indonesia dapat dibandingkan dengan menggunakan metode ini, sehingga memungkinkan penelitian dengan makna mendalam, konsep, dan juga situasi. Dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber merupakan pondasi penting didalam penelitian. Teknik kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik dan kontekstual, Rusandi dan Rusli (2021).

Pembahasan berikut merupakan bagian dari studi literatur untuk mengumpulkan data:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas kerangka konseptual akuntansi
2. Dokumen resmi seperti IFRS dan *Financial Accounting Standard Statement* (PSAK)
3. Buku teks dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan teori dan praktik akuntansi di Indonesia. Peneliti bisa menemukan perbedaan antara teori dan praktik serta mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai materi pembelajaran yaitu dengan menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data.

Menurut Adlini et al. (2022), dalam penelitian kualitatif, pencarian dan pemeriksaan beberapa karya sastra terkait dapat dilakukan sebelum, selama, dan mengikuti proses pengumpulan dan analisis data. Tahapan-tahapan itu diambil untuk melakukan analisis data menggunakan metode tematik, yang menyatukan beberapa tema menjadi satu tema utama:

1. Pengkodean, menyoroti bagian-bagian terkait dalam teks dengan fokus penelitian
2. Kategorisasi: kode dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih umum
3. Tema diidentifikasi; tema utama yang muncul dari kategori ini diidentifikasi
4. Tema ditafsirkan, dianalisis, dan ditafsirkan dalam rangka menentukan persamaan dan perbedaan antara kerangka konseptual global dan penerapannya di Indonesia. Karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengungkapkan pola dan makna yang ada dalam data kualitatif, analisis tematik yang telah dipilih.

Heriyanto (2018) menyatakan bahwa salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendeteksi tema dan pola dalam data yang diperoleh adalah analisis tematik.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Kerangka Konseptual IFRS dan SAK di Indonesia

Sejak Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara bertahap mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2012, kerangka konsep IFRS di Indonesia telah mengalami kemajuan besar dalam penerapannya. Meskipun IFRS dimaksudkan untuk memberikan kerangka pelaporan keuangan yang dapat digunakan di seluruh dunia, Indonesia perlu menyesuaikan kerangka tersebut dengan budaya, ekonomi, hukum, dan sosialnya yang berbeda. Berdasarkan prinsip, IFRS menekankan penggunaan prinsip umum dan penilaian profesional (judgment) dalam pelaporan keuangan. Sebaliknya, kerangka SAK yang ada di Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan berbasis aturan, yang bergantung pada aturan yang lebih rinci. Dengan perbedaan metode ini, transisi dan pelaksanaan IFRS menjadi sulit. Hal ini berlaku pada entitas yang terbiasa mengikuti aturan eksplisit tanpa banyak ruang untuk pertimbangan subjektif.

Sejak tahun 2020, DSAK-IAI telah memperbarui Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan untuk sesuai dengan versi 2018 dari IFRS Conceptual Framework. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan di Indonesia melalui penyempurnaan definisi elemen laporan keuangan (asset, liabilitas, pendapatan, dan beban), standar pengakuan, dan dasar pengukuran.

Mengacu pada Update SAK 2023 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah memasukkan sebagian besar standar International Financial Reporting Standards (IFRS) ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia. PSAK bernilai sangat penting, seperti PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan (mengadopsi IFRS 9), PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (mengadopsi IFRS 15), dan PSAK 116 tentang Sewa (mengadopsi IFRS 16), semuanya diadopsi dalam standar ini. Ketiga standar ini sangat mirip dengan standar internasional dan telah diterapkan secara efektif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023; PwC Indonesia, 2023).

Meskipun demikian, masih banyak perbedaan yang menonjol dalam praktiknya, terutama dalam hal interpretasi dan implementasi pada tingkat entitas. Faktor lokal seperti kesiapan informasi teknologi, kualitas dan distribusi infrastruktur akuntansi, serta pengaruh budaya organisasi dan nilai lokal menghalangi penerimaan sepenuhnya IFRS. Karena SAK cenderung lebih berdasarkan aturan yang eksplisit, adaptasi terhadap pendekatan keputusan yang dominan dalam IFRS sering kali menjadi tantangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusandi dan Rusli (2021), salah satu kendala utama dalam proses penyatuan standar global adalah kurangnya pengetahuan tentang IFRS, terutama dikalangan praktis di wilayah Indonesia. Pelatihan yang tidak memadai, ketersediaan sumber daya pembelajaran yang terbatas, dan penurunan kualitas sumber daya manusia akuntansi semuanya menjadi masalah yang krusial. Selain itu, mereka juga menekankan bahwa peraturan yang tumpang tindih antara otoritas seperti DSAK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan pemerintah menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan IFRS.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Murtini (2016), yang menunjukkan bahwa meskipun penerapan IFRS telah meningkatkan kualitas informasi akuntansi dari perspektif relevansi, penerapannya memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri. Membangun budaya akuntansi yang mendukung penggunaan penelitian secara konsisten dan profesional adalah salah satu tantangan yang sulit.

Oleh karena itu, untuk menyesuaikan standar internasional dengan keadaan lokal, diperlukan beberapa strategi, seperti :

1. Membuat pedoman implementasi praktik khusus berdasarkan sektor industri agar entitas memiliki referensi yang relevan dengan aspek kegiatan usaha mereka.
2. Meningkatkan pengetahuan akuntan publik dan korporasi tentang IFRS, termasuk melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan profesional.
3. Menggabungkan peraturan antara lembaga untuk menghasilkan kerangka kebijakan akuntansi nasional yang lebih konsisten.
4. Meningkatkan infrastruktur pelaporan keuangan dan audit berbasis digital, sehingga proses pelaporan dapat memenuhi standar efisiensi dan transparansi internasional.

Dengan menerapkan tindakan strategi ini, harmonisasi antara kerangka konsep IFRS dan PSAK akan lebih berkelanjutan dari sisi teknis dan lebih praktis di lingkungan lokal Indonesia.

Perbedaan Konseptual dan Dampaknya terhadap Praktik Akuntansi

1. Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual IFRS (2018), yang diadopsi oleh DSAK-IAI pada tahun 2020, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pengguna utama lainnya yang membantu membuat keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup posisi keuangan perusahaan, risiko usaha, dan potensi arus kas masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Namun, dalam situasi di Indonesia, metode ini seringkali dibandingkan dengan metode berbasis kepatuhan, terutama untuk entitas yang berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan dan peraturan regulator lokal. Lebih sering daripada tidak, laporan keuangan digunakan untuk tujuan administratif daripada membantu dalam pengambilan

keputusan strategi. Dalam banyak kasus, pelaporan juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah atau melindungi sektor UMKM daripada hanya memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pengguna eksternal.

Perbedaan perspektif ini berdampak langsung pada struktur, isi, dan fokus laporan keuangan. Misalnya, ada kecenderungan bagi banyak entitas untuk menyimpan pengakuan pendapatan atau beban mereka untuk tujuan perpajakan. Namun, menurut PSAK 115 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), pengakuan pendapatan harus didasarkan pada kewajiban kinerja yang telah dipenuhi, bukan pencatatan yang berdasarkan kas.

2. Standar Pengakuan dan Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan dalam SAK lama adalah salah satu perbedaan utama antara IFRS dan metode lama. Nilai wajar, sebagai representasi ekonomi dari aset atau liabilitas pada saat pelaporan, sangat penting menurut IFRS. Berbagai PSAK baru menunjukkan ini, misalnya:

- a. PSAK 109: Instrumen Keuangan (mengadopsi IFRS 9) yang mewajibkan pengukuran nilai wajar untuk sebagian besar aset keuangan
- b. PSAK 116: Sewa (diadopsi dari IFRS 16), yang mengubah akuntansi penyewa dari pendekatan operasional ke pendekatan hak guna.
- c. PSAK 241: Pertanian, dan PSAK 241 (baru) mengatur pengukuran aset biologi dengan pendekatan fair value less cost to sell.

Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan Indonesia sering menghadapi masalah seperti berikut:

- a. Tidak adanya pasar aktif yang dapat digunakan sebagai referensi nilai wajar, terutama dalam sektor pertanian dan properti daerah
- b. Sedikit penilai independen yang tersertifikasi; sistem informasi akuntansi yang tidak mendukung pengukuran berdasarkan nilai wajar secara real-time
- c. Kurangnya pemahaman manajemen tentang pendekatan Level 2 dan 3 fair value hierarchy.

Akibatnya, meskipun PSAK secara formal telah mengadopsi nilai wajar, dalam praktiknya banyak entitas masih menggunakan biaya historis (biaya historis) dengan justifikasi keterbatasan sumber data atau risiko audit yang tinggi.

3. Kualitas Informasi dan Profesionalisme

Relevansi, representasi jujur, dapat dibandingkan, dapat dipraktekkan, dan dapat dipahami adalah ciri kualitatif laporan keuangan yang ditekankan oleh IFRS. Namun demikian, faktor struktural seperti berikut :

- a. Membuat penerapan prinsip-prinsip ini cukup sulit di Indonesia. Sangat sedikit orang di daerah dan UMKM yang memahami IFRS.
- b. Ketergantungan tinggi pada pedoman teknis dan peraturan rinci daripada penilaian profesional.
- c. Ada perbedaan kapasitas dan kemampuan antara akuntan publik dan auditor.

Laporan dari PwC Indonesia (2023) menunjukkan bahwa banyak entitas di

Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK terbaru secara benar, terutama dalam klasifikasi instrumen keuangan (PSAK 109) dan pengakuan pendapatan (PSAK 115). Audit juga masih menemukan banyak ketidaksesuaian dalam mencerminkan nilai wajar, meskipun hal tersebut diwajibkan dalam PSAK 113 (Pengukuran Nilai Wajar).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kualitas informasi akuntansi adalah kurangnya pengawasan dan audit internal efektif. Selain itu, penyesuaian laporan keuangan biasanya dilakukan setelah audit, bukan sebagai bagian dari system pelaporan yang baik sejak awal.

Pendekatan Lokal dalam Menghadapi IFRS

DSAK-IAI sejak awal menyadari bahwa penerapan IFRS secara keseluruhan di Indonesia tidak mungkin terjadi karena perbedaan infrastruktur, literasi, dan kebutuhan regulasi fiskal. Akibatnya, strategi endorsement digunakan: setiap IFRS dipilih, dievaluasi dampak, dan kemudian "disah-kan" (diterima) dengan penyesuaian lokal sebelum dimasukkan ke dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Proses ini menghasilkan "PSAK versi Indonesia" yang mengikuti prinsip IFRS tetapi sesuai dengan regulasi perpajakan dan OJK, kondisi pasar domestik, dan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

1. Ruang Lingkup & Landasan

Setelah diadopsi dari IFRS for SMEs edisi 2015, SAK Privat dirancang untuk mencakup: praktis bagi keluarga, koperasi, start-up, dan bisnis kecil dan menengah, sesuai dengan PSAK umum, yang berbasis IFRS penuh, sehingga laporan dapat "naik kelas" tanpa melakukan restatement yang signifikan. Entitas dapat menggunakan SAK Privat asal tanpa harus (1) memiliki status lembaga keuangan, (2) menerbitkan instrumen di pasar modal, atau (3) diwajibkan oleh regulator untuk menggunakan SAK umum (PwC Indonesia, 2023).

2. Karakter Teknis Penting

- a. Basis akrual penuh, ketika hak dan kewajiban timbul, tidak ada beban dan pendapatan yang diakui, estimasi kompleks (seperti kehilangan kredit yang diantisipasi menurut PSAK 109) substrat.
- b. Pengukuran nilai wajar terbatas hanya diwajibkan untuk investasi properti, instruksi keuangan dasar untuk derivatif. Jika nilai wajar aset biologi sulit diestimasi, biaya aset biologi dapat dihitung (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).
- c. Pendapatan menggunakan ilustrasi kontrak sederhana dan catatan emisi yang lebih ringkas, tetapi mengikuti model lima langkah IFRS 15.
- d. Pelepasan pendapatan umum tambahan seluruh perubahan nilai wajar dicatat langsung ke laba-rugi, tidak ada OCI, sehingga pengguna laporan lebih mudah memahami kinerja.
- e. Pengungkapan lebih tipis, catatan rata-rata hanya sepuluh hingga lima belas halaman, dibandingkan dengan PSAK umum yang mencakup antara enam puluh dan seratus halaman (PwC Indonesia, 2023).

3. Manfaat Strategis

Kualitas informasi meningkatkan relevansi dan keterbandingan tanpa membebani entitas kecil dengan aturan yang rumit. Kapasitas SDM mendorong perguruan tinggi dan

IAI untuk memperbarui kurikulum IFRS-SME serta menyediakan pelatihan online murah (Rusandi & Rusli, 2021). Sinkronisasi fiskal memudahkan DJP membuat pedoman rekonsiliasi laba komersial-fiskal karena struktur akun SAK Privat lebih ringkas. Akses pembiayaan laporan yang lebih.

4. Tantangan Implementasi

- a. Literasi dan pendampingan, banyak UMKM di daerah yang belum familiar dengan istilah “kewajiban kinerja” atau “penolakan”.
- b. Perangkat lunak akuntansi, banyak aplikasi kasir dan ERP lokal masih berbasis SAK ETAP atau historis, dan patch baru diperlukan.
- c. Audit & Penegakan, program audit kantor akuntan publik skala kecil harus disesuaikan dengan prinsip dan estimasi nilai wajar.

Reformasi Pendidikan dan profesi akuntansi Fokus pendidikan akuntansi saat ini adalah meningkatkan kompetensi IFRS-SME, etika, dan keputusan profesional. IAI dan lembaga sertifikasi profesional telah mengeluarkan modul SAK Privat dalam bahasa Indonesia, sering mengadakan web-seminar untuk dosen dan praktisi, memasukkan studi kasus-kasus yang bernilai wajar sederhana untuk ujian sertifikasi akuntansi. Diharapkan bahwa upaya ini akan memperbaiki perbedaan antara praktik lapangan dan gagasan standar global. Ini juga akan memperkuat posisi laporan keuangan Indonesia di mata pemangku kepentingan internasional.

Efek pada Pihak Berwenang dan Sistem Regulasi

Regulator, pembuat kebijakan, dan sistem pengawasan nasional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penerapan kerangka konsep IFRS dalam sistem pelaporan keuangan negara tersebut. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan tuntutan terhadap kemampuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengawasi praktik pelaporan yang semakin kompleks dan berbasis prinsip (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

1. Transformasi Regulasi dan Kebijakan

Regulator kebijakan secara bertahap mewajibkan pelaksanaan PSAK yang telah diendorse dan diselaraskan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi IFRS. Misalnya;

- a. PSAK 109 (setara IFRS 9) menggantikan PSAK 55. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, perbankan dan emiten dipaksa untuk membuat model kerugian ekspektasi kredit juga dikenal sebagai model kerugian kredit ekspektasi yang berdampak langsung pada cadangan kerugian dan modal (PwC Indonesia, 2023)
- b. PSAK 116 (setara IFRS 16) mewajibkan pengakuan aset dan liabilitas penyewa bagi penyewa, sehingga perusahaan tidak lagi dapat menyembunyikan kewajiban jangka panjang di luar neraca (off-balance sheet), meningkatkan transparansi, dan meningkatkan pengawasan kredit.

Kebijakan nasional sepenuhnya mengikuti IFRS, dengan entitas non-publik harus mengikuti SAK Entitas Privat (SAK EP) pada tahun 2025, menggantikan SAK ETAP.

2. Tantangan DJP dan Harmonisasi Keuangan

Perpajakan adalah salah satu masalah besar yang muncul. Jika dibandingkan dengan PSAK lama yang berbasis pada biaya historis, PSAK berbasis IFRS cenderung menghasilkan perbedaan temporer yang lebih besar. Misalnya, pengakuan pendapatan yang didasarkan pada PSAK 115 yang didasarkan pada IFRS 15 seringkali lebih lambat

daripada metode kas atau faktur yang digunakan untuk tujuan pajak. Hal ini menyebabkan rekonsiliasi yang lebih rinci antara keuntungan fiskal dan keuntungan komersial yang diperlukan. Berdasarkan PSAK terbaru, DJP menerbitkan panduan pengisian SPT dan bekerja sama dengan IAI dan Kantor Akuntan Publik (Rusandi & Rusli, 2021).

3. Efektif untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor

Persepsi pelaporan keuangan Indonesia yang lebih transparan dan akuntabel telah meningkat seiring dengan penerapan IFRS. Dengan menggunakan prinsip nilai wajar, mengungkapkan risiko keuangan, dan penurunan nilai berdasarkan ekspektasi masa depan, laporan keuangan dianggap lebih mencerminkan risiko dan realitas ekonomi perusahaan. Hal ini mempengaruhi peringkat emiten Indonesia meningkat, pasar modal mengalami peningkatan volume perdagangan saham dan obligasi, jumlah investor institusional asing yang masuk ke pasar domestik terus meningkat. Adanya peningkatan penerapan PSAK 109 – 116 dan pelatihan IFRS yang diintensifkan oleh OJK dan asosiasi profesi antara tahun 2020 dan 2023 menyebabkan peningkatan jumlah investor asing (PwC Indonesia, 2023).

4. Sistem Adaptasi dan Sumber Daya Manusia

Berbagai otoritas telah bertindak untuk mendukung perubahan system peraturan ini :

- a. Mewajibkan perusahaan public untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis IFRS
- b. Membuat fasilitas pelatihan IFRS yang terakreditasi di seluruh negeri
- c. Mengembangkan aplikasi kehadiran PSAK berbasis kecerdasan buatan yang digunakan oleh OJK untuk membantu pengawasan berbasis data yang lebih efektif.

Simpulan

Sejak diadopsi secara bertahap oleh DSAK-IAI pada tahun 2012, kerangka konsep IFRS telah berkembang pesat di Indonesia. Namun, proses harmonisasi ini menghadapi banyak tantangan karena perbedaan dalam konteks budaya, hukum, sosial, dan ekonomi. Perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis prinsip dalam IFRS dan pendekatan berbasis aturan dalam SAK menyebabkan kesulitan untuk diterapkan, terutama bagi organisasi yang terbiasa dengan kepatuhan administratif yang ketat.

Selain itu, perbedaan tujuan pelaporan keuangan menunjukkan adanya orientasi ganda dalam praktik akuntansi Indonesia, yang mengutamakan pengambilan keputusan ekonomi serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan sektor UMKM. Tantangan lain, seperti kurangnya pasar aktif, kurangnya pemahaman tentang nilai wajar, dan variasi dalam kompetensi profesional, juga mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Untuk mengatasi masalah ini, DSAK-IAI menerapkan pendekatan *endorsement*. Pendekatan ini memungkinkan pembentukan PSAK, yang memungkinkan penyesuaian IFRS dengan karakteristik lokal, termasuk pembentukan SAK ETAP untuk organisasi skala kecil. Reformasi dibidang pendidikan dan peningkatan keterampilan akuntansi profesional mendukung langkah ini. Regulator dan pemangku kepentingan dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan IFRS. Meskipun meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor , hal ini juga memerlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan peningkatan kapasitas institusi pengawas. Indonesia semakin dekat dengan praktik pelaporan keuangan global yang

transparan, relevan, dan dapat dibandingkan berkat komitmen terus-menerus dari OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan.

Perlu sebuah langkah strategis untuk penyesuaian yang lebih efektif. Diperlukan sinergi yang kuat dalam kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi internasional agar tidak terjadi disorientasi. Kemudian diperlukan reformasi dalam kurikulum pendidikan guna mencetak profesional yang tidak hanya memahami standar global, melainkan juga kontekstualisasi lokal. Dan diperlukan peningkatan lembaga pengawas juga keuangan lintas sektor yang membawa peran krusial dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan di era global. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mengikuti sebuah standar global melainkan juga mampu memberikan kontribusi yang lebih inklusif dan relevan secara global sehingga terdapat peningkatan integritas dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang maha esa. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul "Landasan Standar Akuntansi mengenai Perbandingan Prinsip Kerangka Konseptual Global dan Realitas Indonesia". Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada Bapak Aryanto Nur, SE, MM, Ak, CPA atas arahan dan bimbingannya sehingga artikel ilmiah ini bisa tersusun sebagaimana mestinya.

Penulis berharap artikel ini dapat memberikan berbagai kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi. Selain itu, diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi maupun pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dalam bidang Akuntansi guna mengembangkan teori Akuntansi masa kini maupun masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aرسال, M., Sulvia, S., Anwar, S. W., & Wiranti, W. 2025. *Dampak globalisasi terhadap praktik akuntansi: IFRS, konvergensi standar, dan kompleksitas pelaporan keuangan*. IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting), 6(1). Diakses dari <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/5101/2763>. Pada tanggal 3 Mei 2025
- [2] ATLAS.ti. *Conceptual framework in qualitative research*, Diakses dari: <https://atlasti.com/guides/qualitative-research-guide-part-1/conceptual-framework>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2025
- [3] Citriadin, Y. 2020. *Metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan dasar*. CV. Sanabil. Diakses dari [https://repository.uinmataram.ac.id/1735/1/II.C.1%20BUKU%20METODE%20PENELITIAN_Yudin%20\(1\).pdf?utm](https://repository.uinmataram.ac.id/1735/1/II.C.1%20BUKU%20METODE%20PENELITIAN_Yudin%20(1).pdf?utm). Diakses pada tanggal 4 Mei 2025
- [4] Citriadin, Y. 2025. *Analisis dampak implementasi PSAK 116 pada laporan keuangan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 9(1), 1–15. Diakses dari <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5165>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [5] Devry, C., & Khomsiyah. 2025. *Analisa persiapan implementasi PSAK 117 kontrak asuransi serta dampaknya terhadap perusahaan asuransi kerugian di Indonesia*. Jurnal Buana Akuntansi, 10(1), 10–18. Diakses dari <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v10i1.7699>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025

- [6] Febriyana, S., & Oktaviani, L. 2024. *Analisis perlakuan akuntansi persediaan barang dagang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah pada Swalayan Al-Khuzaimah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo*. Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis, 2(2), 90-100. Diakses dari <https://doi.org/10.35316/mazinda.v2i2.5423>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- [7] International Accounting Standards Board (IASB). 2018. *Conceptual framework for financial reporting*. IFRS Foundation. Diakses dari <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- [8] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2024. *Berita pengesahan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan*. Diakses dari <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/-berita-pengesahan-kerangka-konseptual-pelaporan-keuangan-dan-standar-akuntansi-keuangan#gsc.tab=0>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia. 2023. *SAK Update - Perbandingan SAK Internasional dan SAK Indonesia per 2023*. Diakses dari https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/sak_update_-_perbandingan_sak_internasional_dan_sak_indonesia_per_2023. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [10] Ikatan Akuntan Indonesia. 2023. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat*. Diakses dari https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_akuntansi_keuangan_indonesia_untuk_entitas_privat. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [11] Kalesaran, J. R., & Sondakh, J. J. 2021. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa*. Jurnal EMBA, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/37006/34311>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025,
- [12] Majalah Ilmiah UPN. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. UPN Veteran Jakarta, C Diakses dari https://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Majalah_Ilmiah%20UPN/bw-vol23-no3-apr2012/154-160.pdf. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025
- [13] Murtini, W. 2016. *Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Kualitas Informasi Akuntansi*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17(1), 1–11. (Referensi ini tetap digunakan karena relevan secara substansi dan sering dijadikan dasar dalam penelitian lanjutan) Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/305617850_IFRS_dan_Kualitas_Informasi_Investasi. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [14] Napitupulu, S., & Setiawan, I. 2023. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Petra, Diakses dari <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/15662/15654>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025,
- [15] Pratama, F. A. 2021. *Sebuah kesenjangan implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS): Antara teori, praktik, dan riset pada perguruan tinggi*, Diakses dari <https://www.academia.edu/57688960/>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025,
- [16] *PwCIndonesia*. 2023. *Perbandingan PSAK dan IFRS 2023*. Diakses dari <https://www.pwc.com/id/en/publications/assurance/psak-vs-ifrs-2023.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [17] Rusandi, E. & Rusli, H. 2021. *Analisis Implementasi IFRS di Indonesia dalam Perspektif Standar Global dan Lokal*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 14(2), 134–145. Diakses dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jakws/article/download/643/581>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025
- [18] Widya Mandala Catholic University. *Repository UKWMS*, Diakses dari <https://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/416/3/Lampiran.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025
- [19] Yulitasari, L., & Suryanto, T. 2024. *Studi Komparasi Tantangan Pelaksanaan Audit di Nigeria dan China*. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12(2), 200–215. Diakses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/article/view/28915>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2025